PERAN ETNIS TIONGHOA PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL: KAJIAN PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN SEJARAH DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Hendra Kurniawan

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sanata Dharma
Alamat korespondensi: Jl. Affandi Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta
Email: *hendrayang7@gmail.com*

ABSTRACT

This research was aimed to describe the role of the Chinese community during the Indonesia's national movement, to design the way of learning history in the senior high school, and to elaborate the importance of studying the role of the Chinese community during Indonesia's national movement for the younger generation. This research uses historical and qualitative descriptive method using literature. The result shows that (1) Chinese community took importance roles in national struggling during Indonesia's national movement; (2) The study of the Chinese community's roles in the Indonesia's national movement can be integrated into the way of learning history in senior high school; (3) Studying the roles of the Chinese community during the Indonesia's national movement can develop the harmony in social life.

Keywords: *Tionghoa, pergerakan nasional, pembelajaran sejarah.*

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia memiliki struktur yang unik. Nasikun (1984: 30) menyebutkan secara horizontal, masyarakat Indonesia memiliki kesatuan-kesatuan sosial atas dasar ikatan primordial, seperti suku, agama, adat, daerah, hingga hubungan darah. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan antara lapisan atas dengan lapisan bawah. J.S. Furnivall dalam M.D. La Ode (2012: 1) juga mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk (*plural societies*). Keanekaragaman ini apabila tidak disikapi secara bijak akan melahirkan perbedaan kepentingan yang berujung pada konflik dan perpecahan.

Salah satu keberagaman suku yang ada di Indonesia yaitu keberadaan etnis Tionghoa yang sudah berabad-abad menjadi bagian dari bangsa ini. Sayangnya Tionghoa seringkali dianggap sebagai kelompok yang apolitik dan asosial. Selain akibat kebijakan kolonial Belanda yang masih membekas, juga didorong oleh perlakuan diskriminatif pemerintah Orde Baru. Tionghoa dianggap tidak memiliki peran dalam sejarah nasional, rasa nasionalisme ke-Indonesiaan-nya rendah, dituduh memihak Belanda, dan hanya mementingkan keselamatan diri sendiri. Pemikiran seperti ini perlu diluruskan dengan mengungkap berbagai peran dan keterlibatan etnis Tionghoa dalam sejarah nasional Indonesia.

Sejarah masyarakat Tionghoa jarang diangkat atau hanya memiliki porsi kecil dalam konteks sejarah nasional. Padahal orang Tionghoa tersebar dan dapat ditemui di setiap kota dari Sabang sampai Merauke. Meskipun sama halnya dengan orang asing lain yang datang ke Indonesia, seperti Arab, India, dan Eropa, namun orang Tionghoa jumlahnya yang paling banyak dan paling dulu datang. Tidak sedikit orang Tionghoa yang menikah dengan wanita pribumi dan memiliki keturunan sehingga menganggap Indonesia menjadi tanah tumpah darahnya.

Dalam penelitian ini dipaparkan mengenai peran etnis Tionghoa pada masa pergerakan nasional di awal abad 20. Selain itu dirumuskan pula rancangan pengintegrasiannya dalam pembelajaran sejarah di SMA mengacu pada Kurikulum 2013. Dengan mempelajari materi ini, maka peserta didik dapat semakin menyadari kenyataan akan kemajemukan bangsa yang bermuara pada penanaman sikap menghargai nilai-nilai multikultural dan menumbuhkembangkan

rasa toleransi. Kajian ini juga dapat mendukung upaya penulisan sejarah nasional untuk menuju ke arah integrasi bangsa.

Tujuan penelitian ini yaitu (1) memaparkan peran Tionghoa dalam pergerakan nasional Indonesia pada awal abad 20; (2) menghasilkan rancangan pembelajaran sejarah untuk tingkat SMA dengan materi peran Tionghoa pada masa pergerakan nasional Indonesia; dan (3) mengetahui arti penting mempelajari peran Tionghoa dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Manfaat penelitian ini antara lain (1) memberi masukan bagi guru dalam mengembangkan materi pembelajaran sejarah khususnya mengenai Tionghoa; (2) setelah diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah, maka diharapkan dapat menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai; (3) mendorong sekolah lebih mengembangkan semangat penghargaan terhadap keberagaman demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan cinta damai; dan (4) sebagai usulan bagi pemerintah dalam pengembangan kurikulum sejarah.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Etnis Tionghoa

Istilah Tionghoa dan Tiongkok berasal dari bahasa Kanton, salah satu bahasa yang digunakan oleh orang Tionghoa di Indonesia. Tionghoa artinya orang Cina dan Tiongkok artinya negara Cina. Pada masa Orde Baru digunakan istilah Cina untuk menyebut Tionghoa di Indonesia. Penggunaan istilah ini diputuskan dalam pertemuan perwira-perwira tinggi ABRI di Bandung pasca Peristiwa 1965 yang diduga melibatkan komunis Tiongkok. Istilah Cina dulu digunakan pada masa kolonial untuk merendahkan dan menghina orang Tionghoa. Penggunaan istilah Cina dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapuskan perasaan superior dan inferior antara Tionghoa dengan pribumi (Choirul Mahfud, 2013: 51).

Penggunaan istilah Cina disahkan melalui Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/ Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Kebijakan ini menimbulkan dampak psikososial dan diskriminatif dalam relasi sosial yang dialami masyarakat Tionghoa selama puluhan tahun. Pandangan dan perlakuan diskriminatif jelas melanggar prinsip hak asasi manusia dan bertentangan dengan UUD 1945. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono keluarlah Keppres Nomor 12 Tahun 2014 yang memulihkan kembali sebutan Republik Rakyat Tiongkok untuk menyebut negara Republik Rakyat Cina dan Tionghoa untuk menyebut orang atau komunitas Cina di Indonesia.

Menurut Benny G. Setiono (2008: 21), orang Tionghoa mulai berdatangan ke Nusantara pada abad ke-9, zaman Dinasti Tang. Mereka datang untuk mencari penghidupan yang lebih baik dengan jalan berdagang atau bertani. Menurut banyak ahli, salah satunya Prof. Kong Yuanzhi (2005: 1-12), sebagian besar bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunnan di Tiongkok barat daya. Dari sinilah terjadi penyebaran orang yang disebut Melayu Prasejarah yaitu *Proto Melayu* dan *Deutro Melayu* sehingga ada jalinan hubungan darah antara orang Tionghoa dengan sebagian besar suku bangsa yang ada di Indonesia (Benny G. Setiono, 2008: 13). Masalah asli-tidak asli, pribumi-nonpribumi sangat tidak relevan untuk dipersoalkan dan menjadi sangat kabur. Secara antropologis, semua penduduk Indonesia saat ini sebenarnya bukan asli dari Indonesia. Bedanya hanya soal waktu leluhurnya mulai berdatangan ke Nusantara. (Benny G. Setiono, 2008: 16)

Choirul Mahfud (2013: 50) mengemukakan bahwa orang Tionghoa yang sudah menyatakan diri menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis masuk ke dalam masyarakat Indonesia. Etnis Tionghoa setara dengan suku atau etnis lainnya yang turut membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Benny G. Setiono (2008: 41) menyebut masyarakat Tionghoa telah menjadi produk sejarah. Jumlahnya puluhan juta orang, belum termasuk kelompok peranakan yaitu hasil kawin campur antara Tionghoa dengan pribumi. Menurut Leo Suryadinata (1986: 20), kaum peranakan telah berakulturasi ke dalam masyarakat setempat dan hubungannya dengan Tiongkok sangat tipis.

2.2 Pergerakan Nasional Indonesia

A.K. Pringgodigdo (1994: vi) menjelaskan istilah pergerakan nasional Indonesia meliputi segala macam aksi yang dilakukan melalui organisasi modern ke arah perbaikan hidup untuk bangsa Indonesia karena tidak puas dengan keadaan masyarakat yang ada. Pergerakan nasional Indonesia dihitung dari mulai berdirinya Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908. Pergerakan bukan hanya pada soal aksi politik secara menyeluruh, namun juga mengandung bagian-bagian

dari unsur ekonomi, kebudayaan, keagamaan, pendidikan, wanita, dan pemuda. Dari segi kewilayahan, bukan saja untuk kepentingan bangsa seluruhnya, namun juga meliputi bagian-bagian dari bangsa, seperti Jawa, Sumatera, Indonesia Timur, dan sebagainya. Pergerakan bukan hanya kelompok radikal, namun juga gerakan yang bersifat kooperatif. Pergerakan tidak hanya golongan kebangsaan tetapi juga meliputi gerakan keagamaan, marxis, dan komunitas lainnya.

Menurut Benedict Anderson (2001: 8), bangsa atau nasion adalah komunitas yang terbayang karena para anggotanya tidak mengenal sebagian besar anggota lain, tidak bertatap muka, bahkan tidak mendengar tentang anggota yang lain itu, namun di benak setiap anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka. Sartono Kartodirdjo (1995: 4) juga mengungkapkan konsep nasion sebagai komunitas politik berdasarkan kemauan politik kolektif dan solidaritas yang berakar pada pengalaman bersama di masa lampau. Oleh sebab itu, sejarah nasional merupakan suatu unit yang terdiri atas kompleksitas unsur-unsur etnis, linguistik, religius, kultural, yudisial, dan sebagainya yang melalui proses perkembangan sejarah akhirnya terwujud sebagai suatu kesatuan.

Pergerakan nasional Indonesia muncul karena berbagai faktor baik dari dalam maupun luar. M.C. Ricklefs (1991: 247) memaparkan kunci perkembangan masa pergerakan nasional Indonesia adalah munculnya ide-ide baru mengenai organisasi dan dikenalnya definisi-definisi baru tentang identitas. Organisasi-organisasi modern ini didirikan oleh kalangan priyayi baru yang merupakan golongan terpelajar akibat dari Politik Etis. Meskipun berbagai organisasi pergerakan bisa saja berangkat dari etnosentrisme, etnonasionalisme, komunalisme, dan primordialisme lainnya namun perlahan cair digantikan oleh solidaritas nasional (Sartono Kartodirdjo, 1995: 8).

2.3 Pembelajaran Sejarah

Sidi Gazalba (1966:11) mengemukakan bahwa sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan, yang memberi pemahaman tentang apa yang telah berlalu itu. Sementara itu Taufik Abdullah (2001: 98) menjelaskan sejarah sebagai hasil dari usaha untuk merekam, melukiskan, dan menerangkan peristiwa masa lalu.

Aman (2011: 31-32, 35) menjelaskan bahwa sejarah dapat menanamkan kesadaran persatuan, persaudaraan, dan solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna mengatasi krisis multidimensional dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran sejarah tidak semata-mata memberi pengetahuan, fakta, dan kronologi. Pembelajaran sejarah memiliki tugas utama menanamkan semangat berbangsa dan bertanah air dalam rangka *character building* peserta didik. Di samping itu, pembelajaran sejarah juga berguna untuk membangkitkan kesadaran (*emphatic awareness*) peserta didik, yakni sikap simpati dan toleransi yang disertai kemampuan mental dan sosial untuk mengembangkan imajinasi dan sikap kreatif, inovatif, serta partisipatif (Aman, 2011: 2).

Djoko Suryo dalam Aman (2011: 97-98) menjelaskan materi pembelajaran sejarah sebaiknya bertolak pada beberapa wilayah kajian. Salah satunya yaitu sejarah sosial atau sejarah masyarakat (*history from bellow*) yang berpusat pada golongan tertentu, organisasi kemasyarakatan, dan orang kecil untuk melengkapi gambaran dinamika dan proses perkembangan masyarakat secara luas, lengkap, dan kontinue. Sejarah juga harus dapat menjadi landasan bagi pemahaman demokrasi dan pembentukan masyarakat madani (*civil society*). Sartono Kartodirdjo dalam Agus Mulyana dan Darmiasti (2009: 5) juga menjelaskan bahwa Sejarah Indonesia harus merupakan "sejarah dari dalam", yang mengungkapkan aktivitas berbagai golongan masyarakat, dan mengarah pada integrasi bangsa. Materi pembelajaran sejarah harus memuat dinamika berbagai kelompok masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu yang mendominasi.

3. METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji peran etnis Tionghoa pada masa pergerakan nasional digunakan metode historis karena objek permasalahan berupa peristiwa masa lampau. Menurut Louis Gottschalk (1985: 32), metode historis meliputi: (1) heuristik yaitu pengumpulan sumber, (2) kritik atau analisis yaitu menilai sumber,

(3) interpretasi atau sintesis yaitu menafsirkan sumber, dan (4) historiografi yaitu penulisan. Untuk menyusun rancangan pembelajaran sejarah mengenai peran etnis Tionghoa pada masa pergerakan nasional Indonesia dan arti pentingnya digunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti lebih menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam (H.B. Sutopo, 2006: 40).

Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber pustaka berupa buku-buku seputar permasalahan yang dikaji dan dokumen Kurikulum 2013. Pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, yaitu membaca dan menganalisis berbagai buku dan dokumen. Pada tahap kajian historis digunakan teknik analisis historis yang mengutamakan ketajaman dalam melakukan interpretasi sejarah dengan menggunakan berbagai kajian teori. Tahap berikutnya digunakan teknik analisis induktif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Tionghoa pada Masa Pergerakan Nasional

Stigma bahwa Tionghoa dekat dengan Belanda, rasa nasionalisme ke-Indonesia-annya rendah, dan mencari keselamatan bagi diri sendiri merupakan sesuatu yang keliru. Tionghoa juga memiliki *sense of belonging* terhadap negara tempat mereka lahir, tinggal, dan mencari penghidupan. Justru karena pada masa kolonialisme Belanda, Tionghoa berperan sebagai pedagang perantara yang mendistribusikan barang dari kota ke penduduk di desa maka terjadilah praktik diskriminasi. Pemerintah kolonial Belanda membagi masyarakat Hindia Belanda menjadi tiga golongan, yaitu: (1) Eropa atau Belanda, (2) Timur Asing, termasuk Tionghoa, Arab, dan India, dan (3) Pribumi (Onghokham, 2008: 2).

Adanya penetapan zona tinggal (*wijkenstelsel*) yaitu kampung Pecinan serta sistem surat jalan (*passenstelsel*) semakin mendorong bangkitnya nasionalisme Tiongkok (Leo Suryadinata, 1986: 21-22). Orang Tionghoa merasa tidak nyaman karena dipersempit ruang geraknya dalam berdagang sehingga timbul protes dan gerakan sosial. Tionghoa juga tak luput dari berbagai peristiwa sosial dan kemanusiaan dari zaman ke zaman, maka sangat tidak masuk akal apabila Tionghoa disebut tidak memiliki peran dalam sejarah bangsa Indonesia. Meskipun berawal dari nasionalisme negeri asalnya, namun lambat laun sikap nasionalisme terhadap negeri tempatnya tinggal yaitu Indonesia juga semakin tumbuh.

Tahun 1900 di Batavia, Bogor, Sukabumi, dan kota-kota lainnya muncul gerakan *Jong Chineesche Beweging* atau Gerakan Kaum Muda Tionghoa. Anggotanya terdiri dari orang-orang Tionghoa muda dan tua yang berpikiran maju, bercita-cita menumbuhkan dan menanamkan rasa nasionalisme Tiongkok di kalangan Tionghoa di Hindia Belanda. Mereka menuntut dihapuskannya pembatasan atas gerak komunitas Tionghoa, meminta kesamaan hak penuh secara hukum, dan meminta pendirian sekolah-sekolah untuk anak-anak Tionghoa (Benny G. Setiono, 2008: 304; Iskandar Yusuf, 2013: 40).

Perhimpunan Pan-Tionghoa yang didirikan yaitu Tionghoa Hwee Koan (THHK) pada tanggal 17 Maret 1900 di Patekoan, Batavia. Presiden THHK yang pertama yaitu Phoa Keng Hek. Tujuan THHK dalam Anggaran Dasarnya disebutkan mengembangkan adat istiadat dan tradisi Tionghoa sesuai ajaran Konghucu, mengembangkan ilmu pengetahuan, mendirikan gedung perkumpulan untuk tempat pertemuan, dan mendirikan perpustakaan. THHK awalnya menjadi suatu organisasi sosial biasa semacam *study club*. THHK juga berusaha menggalang persatuan Tionghoa perantauan (Hoa Kiao) baik yang peranakan maupun totok. (Leo Suryadinata, 1984: 43; Leo Suryadinata, 1986: 23; Benny G. Setiono, 2008: 306; Iskandar Yusuf, 2013: 48-49). Tionghoa peranakan yaitu hasil kawin campur antara orang Tionghoa dengan pribumi (Benny G. Setiono, 2008: 41). Leo Suryadinata (1986: 20) menambahkan bahwa kaum peranakan telah berakulturasi ke dalam masyarakat setempat dan hubungannya dengan negeri Tiongkok sangat tipis berbeda dengan Tionghoa totok.

THHK berkembang pesat dan muncul gagasan untuk mendirikan sekolah Tionghoa. Pada tanggal 17 Maret 1901 berdirilah sekolah THHK yang pertama bernama Tionghoa Hak Tong berbahasa pengantar Mandarin (Tjeng Im). Sekolah ini berlokasi di Jalan Patekoan Batavia sehingga disebut sekolah Pa Hoa. Sekitar tahun 1904, sekolah THHK ini semakin berkembang hingga ke berbagai kota dengan ribuan siswanya. (Benny G. Setiono, 2008: 308; Iskandar Yusuf, 2013: 52). THHK juga bergerak di bidang sosial ekonomi dan persuratkabaran.

Perkembangan THHK telah menumbuhkan rasa nasionalisme Tionghoa baik peranakan maupun totok di Hindia Belanda meskipun masih dalam koridor Gerakan Pan-Tionghoa (Gerakan Tiongkok Raya). Hal ini tak ubahnya seperti gerakan Pan-Islamisme yang mendorong munculnya organisasi dan gerakan nasionalis umat Islam di Hindia Belanda. Muncul kekhawatiran dari pemerintah kolonial Belanda yang segera mendirikan Biro Urusan Tionghoa. Tugas dari biro ini ialah memberi masukan pada pemerintah dalam menjalankan politiknya terhadap orang Tionghoa di Hindia Belanda (Leo Suryadinata, 1986: 25; Benny G. Setiono, 2008: 311).

Biro Urusan Tionghoa yang dipegang oleh L. H. W. van Sandick dan P. H. Fromberg menganjurkan agar pemerintah kolonial mengekang perkembangan nasionalisme Tionghoa. Untuk itu Belanda mulai melonggarkan berbagai peraturan yang diskriminatif dan mendirikan Sekolah Cina Belanda (*Hollandsche-Chineesche School*-HCS). Belanda juga menggagas UU Kekawulaan Belanda (*Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap*-WNO) yang di dalamnya mengakui Tionghoa peranakan sebagai kawula Belanda (*onderdanen*). Strategi politik ini bertujuan untuk menggalang Tionghoa peranakan agar lebih berorientasi ke Hindia Belanda (Leo Suryadinata, 1986: 26; Benny G. Setiono, 2008: 312-313).

Kelompok Tionghoa yang berorientasi ke Hindia Belanda sangat antusias ketika pada tahun 1917 dikeluarkan aturan yang menetapkan orang Tionghoa boleh memiliki wakilnya di *Volksraad* (Dewan Rakyat). H. H. Kan (Kan Hok Hoei), seorang tuan tanah, berminat masuk dalam *Volksraad*. Sementara itu kelompok surat kabar *Sin Po* dan *Pewarta Soerabaia* menentangnya. Kebanyakan dari mereka masih memegang teguh nasionalisme Tionghoa dan curiga terhadap maksud-maksud Belanda (Leo Suryadinata, 1986: 26-32).

Sejak awal kelompok Sin Po memang menyokong keikutsertaan Tionghoa dalam perpolitikan di negeri Tiongkok. Mereka menolak untuk ambil bagian dalam masalah politik di Hindia Belanda. Tiongkok dianggap pelindung bagi kaum Tionghoa di perantauan. Ketika *Volksraad* dibentuk tahun 1918, ternyata H.H. Kan, Kapiten Liem A Pat, dan Mayor Khouw Kim An menerima pengangkatan mereka sebagai anggota *Volksraad* (Benny G. Setiono, 2008: 486). Hal ini langsung menimbulkan protes keras dari pihak Sin Po. Bahkan ketika UU Kekawulaan Belanda mulai diberlakukan agar tidak ada lagi kewarganegaraan ganda bagi kaum Tionghoa di Hindia Belanda, Sin Po memprakarsai pengumpulan tanda tangan untuk menolaknya.

Tjoe Bou San, tokoh terkemuka Sin Po, mengungkapkan alasan bahwa Tionghoa di Hindia Belanda merupakan bagian integral dari bangsa Tiongkok yang besar. Tionghoa di Hindia Belanda tidak berarti apa-apa, namun menjadi kuat ketika digabung dengan ratusan juta penduduk di negeri Tiongkok. Akan tetapi negeri Tiongkok sendiri tetap menghormati persetujuan konsuler tahun 1911 yang menyebut bahwa Tionghoa di Hindia Belanda harus tunduk pada hukum Belanda (Leo Suryadinata, 1984: 47).

Sementara itu elite Tionghoa yang menempuh pendidikan di Belanda mendirikan Chung Hwa Hui Nederland dengan pusat di Leiden pada tahun 1911. Organisasi ini meskipun mempunyai rasa nasionalisme Tiongkok, namun lebih memosisikan diri sebagai bagian dari Hindia Belanda yang mereka akui sebagai tanah airnya. Mereka memperjuangkan persamaan status antara orang Tionghoa dengan Eropa. Ketika kembali ke Hindia Belanda, kelompok ini mendirikan Chung Hwa Club pada bulan Agustus 1926. Sementara itu tokoh-tokoh Tionghoa yang berada dalam *Volksraad* seperti H. H. Kan dan Khouw Kim An merasa tidak dapat berbuat banyak karena tidak didukung oleh organisasi maupun partai politik tertentu, berbeda dengan kaum Indo yang didukung oleh *Indo Europeesche Verbond*. Gayung bersambut, pada bulan April 1928, saat Chung Hwa menyelenggarakan kongres kedua di Semarang bersama tokoh-tokoh Tionghoa yang ada di *Volksraad*, diputuskan untuk membentuk Chung Hwa Hui (CHH) yang diketuai oleh H. H. Kan (Benny G. Setiono, 2008: 486-488, 493-494).

Munculnya CHH menuai reaksi kelompok Sin Po, Keng Po, dan Sin Jit Po. CHH dianggap sebagai antek Belanda dan memusuhi orang Indonesia. CHH dituduh memecah belah persatuan orang Tionghoa di Hindia Belanda dengan hanya menerima kaum peranakan sebagai anggota. Sebelumnya juga terjadi perdebatan karena CHH lebih memilih menggunakan sebutan Hindia Belanda daripada Indonesia, padahal saat itu sedang hangat-hangatnya semangat nasionalisme ke-Indonesia-an tumbuh seiring dengan berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 (Leo Suryadinata, 1986: 69-70). Pada

perkembangannya terbukti bahwa H.H. Kan semakin menggiring CHH menjadi pro-Belanda. CHH menentang usulan mengenai mayoritas bumiputera dalam *Volksraad*, padahal pers Tionghoa kebanyakan mendukung usulan tersebut (Benny G. Setiono, 2008: 496). Kendati demikian CHH tetap menjadi bagian dari pergerakan nasional. Ini dikarenakan istilah pergerakan bermakna luas, salah satunya pergerakan bukan hanya kelompok yang ingin lepas dari Belanda, namun juga gerakan yang bersifat kooperatif (A. K. Pringgodigdo, 1994: vi).

Dalam Kongres Pemuda Indonesia II di Batavia diikrarkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar itu menyatakan berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia, bertanah satu yaitu Tanah Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Beberapa orang Tionghoa hadir dalam ikrar tersebut meskipun tidak mewakili organisasi-organisasi Tionghoa. Mereka ialah Kwee Thiam Hong (Daud Budiman), Ong Khai Siang, Jong Liauw Tjoan Hok, Tjio Jin Kwee, dan Muhammad Chai (Benny G. Setiono, 2008: 504).

Bangkitnya semangat kebangsaan Indonesia juga membawa pengaruh bagi orang Tionghoa. Saat PNI berdiri, beberapa orang Tionghoa tertarik bergabung di dalamnya, sayangnya menurut Anggaran Dasar PNI, orang-orang bangsa Asia lain hanya boleh menjadi anggota luar biasa. Ada satu kasus yang terjadi, Kwee Tjing Hong, seorang Tionghoa dari Palembang menggagas pendirian cabang PNI di daerahnya. Rapat pembentukan diselenggarakan di rumahnya, namun Tjing Hong jangankan menjadi pengurus, dia hanya diperkenankan menjadi anggota luar biasa. Tjing Hong tetap aktif di PNI, namun akhirnya mengundurkan diri karena teman-teman separtai terus memandangnya sebagai orang Tionghoa yang berarti orang asing, sekalipun ia sudah berusaha keras menjadi orang Indonesia (Benny G. Setiono, 2008: 501).

Ternyata tidak hanya PNI, Soetomo salah seorang tokoh Parindra pernah memuji peranakan Tionghoa sebagai putra Indonesia yang mencintai tanah airnya, Indonesia. Soetomo mendukung gagasan *Indonesierschap* yang digagas oleh Liem Koen Hian yaitu bahwa orang Indonesia baik asli maupun peranakan adalah anggota dari bangsa Indonesia dan bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soetomo tidak pernah mengembangkan konsep kebangsaan yang menempatkan Tionghoa dalam Indonesia merdeka. Soetomo berpandangan bahwa orang Tionghoa masih memiliki ikatan emosional dengan Tiongkok. Sebaliknya Hoesni Thamrin, seorang tokoh Parindra, mengembangkan konsep kebangsaan dengan mengikutsertakan orang Tionghoa di dalamnya. Akan tetapi Hoesni Thamrin menyarankan agar golongan peranakan apapun untuk sementara tidak diterima sebagai anggota partai. (Benny G. Setiono, 2008: 506)

Saat itu konsep *nation* atau kebangsaan Indonesia masih bersifat rasis. Benedict Anderson (2001: 8) menegaskan konsep kebangsaan sebagai sesuatu yang terbayang karena para anggotanya tidak saling mengenal sebagian besar anggota lain, namun di benaknya masing-masing hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka. Sartono Kartodirdjo (1995: 4) juga mengungkapkan konsep kebangsaan sebagai komunitas politik yang terbentuk berdasarkan kemauan politik kolektif dan solidaritas. Dengan demikian konsep kebangsaan Indonesia saat itu dapat dikatakan masih belum dewasa. Para pemimpin partai politik masih menganggap Tionghoa sebagai orang asing yang memiliki ikatan kuat dengan negeri leluhurnya. Sekalipun ada orang Tionghoa yang sudah menganggap Indonesia sebagai tanah tumpah darahnya dan memiliki keinginan untuk turut berjuang bagi kemerdekaan Indonesia tetap tidak beroleh kesempatan masuk dalam partai. Akhirnya orang-orang Tionghoa yang berjiwa nasionalis Indonesia berpendapat bahwa mereka harus membentuk partai politik sendiri.

Pada tanggal 23 Agustus 1932, Liem Koen Hian, seorang Tionghoa yang juga wartawan *Soeara Publiek* menyampaikan gagasannya di Surabaya dan diterbitkan dalam surat kabar Sin Tit Po tanggal 24, 25, dan 26 Agustus 1932. Beliau menegaskan bahwa Indonesia adalah tanah air dan negara dari golongan Tionghoa. Untuk itu orang Tionghoa di Hindia Belanda harus menjadi Indonesia (*Indonesierschap*). Koen Hian tidak sependapat dengan kelompok Sin Po yang menganjurkan nasionalisme Tiongkok dan menolak CHH yang pro-Belanda (Leo Suryadinata, Ed., 2005: 88-94).

Pemikiran Koen Hian ini dapat digunakan untuk mengelompokkon golongan Tionghoa di Indonesia ke dalam tiga aliran politik, yaitu (1) kelompok yang tetap ingin mempertahankan statusnya sebagai orang asing dengan berorientasi pada negeri Tiongkok (Sin Po), (2) kelompok yang pro-Belanda dengan menerima

status setara dengan kawula Belanda (CHH), dan (3) kelompok nasionalis Indonesia yang digagas oleh Koen Hian. Untuk menguatkan yang ketiga ini, maka pada September 1932 di Surabaya, Liem Koen Hian mendeklarasikan berdirinya Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang berkiblat ke Indonesia. Tujuan dari PTI yaitu membantu rakyat Indonesia untuk membangun ekonomi, sosial, dan politik menuju Indonesia yang berdaulat penuh dan rakyatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dalam Anggaran Dasarnya, PTI dengan tegas menyatakan ikut aktif memperjuangkan tercapainya Indonesia merdeka (Benny G. Setiono, 2008: 509).

Liem Koen Hian banyak bergaul dengan para pemimpin perjuangan Indonesia. Menurutnya demi kepentingan Tionghoa, mereka harus bergabung dan berpihak dengan kaum nasionalis dan bukan dengan Belanda. Koen Hian banyak terpengaruh oleh pemikiran dr. Tjipto Mangoenkoesoemo tentang perkembangan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan etnis. Ia mengajak orang Tionghoa untuk menyadari bahwa mereka harus menjadi bangsa Indonesia karena dilahirkan, dibesarkan, dan akan mati dikubur di bumi Indonesia bukan di Tiongkok atau negeri Belanda. Tokoh-tokoh PTI semakin bertambah, seperti Ong Liang Kok, Kwee Thiam Tjing, dr. Tjoa Sik Ien, dan Tan Ling Djie yang mengelola surat kabar Sin Tit Po (Benny G. Setiono, 2008: 512).

PTI semakin mendapat simpati dari kalangan Tionghoa. Keberadaan PTI bersaing ketat dengan CHH termasuk di dalam *Volksraad*. H. H. Kan sebagai wakil CHH sangat pro-Belanda dan bersikap mendua terhadap usulan Petisi Soetardjo. Sementara Ko Kwat Tiong sebagai wakil dari PTI sangat bersemangat dan tegas mendukung Petisi Soetardjo. Sikap Kwat Tiong ini mendapat simpati dari kelompok-kelompok nasionalis Indonesia lainnya. Sementara itu nasib kelompok Sin Po mulai meredup. Sekolah-sekolah milik THHK mulai berkurang peminat sejak pemerintah kolonial Belanda mendirikan HCS. Surat kabar berbahasa Cina tidak populer di kalangan Tionghoa peranakan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada totok. Kegiatan Sin Po juga kemudian lebih fokus membantu Tiongkok berperang melawan Jepang pada akhir dasawarsa 1930-an (Leo Suryadinata, 1986: 107-108).

Pada bulan Mei 1939, sesuai dengan garis politik front persatuan nasional untuk menghadapi agresi militer Jepang, dibentuklah Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI terdiri dari Gerindo, Parindra, Pasoendan, Persatoean Minahasa, Partai Katolik Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Partai Arab Indonesia. CHH tidak berusaha menggabungkan diri karena memiliki kepentingan yang berbeda dengan kelompok nasionalis. Sementara itu PTI berusaha keras bergabung ke dalam GAPI, namun berbeda dengan Partai Arab Indonesia yang menerima posisi sebagai anggota luar biasa, PTI menolak jika harus menjadi anggota luar biasa (Leo Suryadinata, 1986: 152). PTI kemudian dikritik sebagai oportunis, namun PTI memiliki jawaban bahwa "PTI bersedia menerima tanggung jawab dan konsekuensi sebagai anggota penuh dari GAPI, akan tetapi tidak mau *menjadi anggota luar biasa … karena PTI tidak ingin* menjadi anak tiri dari seorang ibu Indonesia" (Benny G. Setiono, 2008: 518).

Kenyataan ini patut disayangkan karena meskipun sudah bertahun-tahun PTI yang merepresentasikan golongan Tionghoa nasionalis dan turut memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini namun masih dibedakan, dianggap asing, dan belum sepenuhnya diterima sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Padahal masalah asli-tidak asli, pribumi-nonpribumi sangat tidak relevan untuk dipersoalkan. Secara antropologis, semua penduduk Indonesia bukan asli dari Indonesia, perbedaannya hanya soal waktu leluhurnya mulai berdatangan menghuni Nusantara. (Benny G. Setiono, 2008: 16)

4.2 Rancangan Pembelajarannya

Materi sejarah merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan. Materi tersebut hendaknya dapat menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensional dalam kehidupan sehari-hari (Aman, 2011: 35). Keberagaman etnis di Indonesia, termasuk Tionghoa, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia selama berabad-abad, etnis Tionghoa turut terlibat dalam pembentukan peradaban dan sejarah bangsa. Untuk itulah peran dan keterlibatan Tionghoa dalam perjalanan sejarah bangsa ini perlu mendapat tempat dalam pembelajaran sejarah

di sekolah guna semakin mempererat persatuan dan persaudaraan.

Sartono Kartodirdjo dalam Agus Mulyana dan Darmiasti (2009: 5) menjelaskan bahwa sejarah haruslah objektif dan mampu menampung berbagai kekuatan yang mempengaruhi perkembangan masyarakat. Sejarah nasional perlu mengungkapkan aktivitas dari berbagai golongan masyarakat, bukan hanya dari kaum elite dan kelompok tertentu saja yang jumlahnya mayoritas. Pemikiran ini semakin menguatkan bahwa sejarah mengenai peran Tionghoa pada masa pergerakan nasional Indonesia dapat menjadi salah satu pokok bahasan dalam pengembangan materi pembelajaran sejarah di sekolah.

Pembelajaran sejarah di sekolah tentu tidak dapat dilepaskan dari kurikulum yang berlaku. Dalam Kurikulum 2013, materi ajar sejarah tidak jauh berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Seperti diketahui bahwa pada masa Orde Baru telah terjadi perlakuan diskriminasi yang masif terhadap golongan Tionghoa maka pokok bahasan mengenai Tionghoa dapat dipastikan tidak disinggung. Dengan demikian pokok bahasan mengenai Tionghoa ini dapat dianggap sebagai bentuk pengembangan materi ajar.

Pengembangan materi ajar dalam Kurikulum 2013 perlu disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Standar isi mengatur kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik. Materi ajar mengenai peran Tionghoa pada masa pergerakan nasional sesuai dengan tingkat kompetensi 5 (kelas X-XI SMA). Pada tingkat ini disebutkan bahwa kompetensi pengetahuan salah satunya harus mencakup wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Sedangkan pada sikap sosial diharapkan peserta didik juga memiliki sikap toleran, damai, dan pro-aktif mendukung solusi atas berbagai permasalahan dalam interaksi di lingkungan sosial.

Djoko Suryo dalam Aman (2011: 97-98) juga menjelaskan bahwa kajian materi pembelajaran sejarah sebaiknya bertolak pada beberapa wilayah kajian. Sejarah mengenai peran Tionghoa pada masa pergerakan nasional ini masuk ke dalam wilayah kajian sejarah sosial atau sejarah masyarakat (*history from bellow*) yang berpusat pada golongan tertentu, organisasi kemasyarakatan, dan orang kecil untuk melengkapi gambaran dinamika dan proses perkembangan masyarakat secara luas, lengkap, dan kontinue.

Dalam Kurikulum 2013 di SMA, mata pelajaran Sejarah Indonesia wajib diberikan pada setiap jenjang dan peminatan, sedangkan mata pelajaran Sejarah hanya diberikan pada peminatan Ilmu Sosial saja. Sejarah mengenai peran Tionghoa pada masa pergerakan nasional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sejarah Indonesia, selain itu materi ini penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat maka hendaknya dapat diberikan pada seluruh peserta didik di SMA. Untuk itu pengembangan materi ini dilakukan untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia (wajib) kelas XI.

Materi mengenai peran Tionghoa pada masa pergerakan nasional dapat diintegrasikan pada KD 3.4. yaitu menganalisis persamaan dan perbedaan pendekatan dan strategi pergerakan nasional di Indonesia pada masa awal kebangkitan nasional, pada masa Sumpah Pemuda, masa sesudahnya sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan. Kompetensi ini bergayut dengan KD 4.4. yaitu mengolah informasi tentang persaman dan perbedaan pendekatan dan strategi pergerakan nasional di Indonesia pada masa awal kebangkitan nasional, pada masa Sumpah Pemuda, masa sesudahnya sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah.

Materi mengenai peran Tionghoa pada masa pergerakan nasional dapat dijadikan sub materi pokok dalam KD 3.4. sehingga dapat ditambahkan indikator sebagai berikut:

1) Mendeskripsikan latar belakang kehidupan warga Tionghoa hingga bangkitnya nasionalisme Tionghoa pada awal abad 20.
2) Mengidentifikasi aliran-aliran politik Tionghoa pada masa pergerakan nasional dan strategi perjuangannya.
3) Menjelaskan perkembangan gerakan Tionghoa menjelang masuknya Jepang ke Indonesia.

Sedangkan dalam KD 4.4. dapat dimasukan rumusan indikator menganalisis dan menyajikan informasi mengenai aliran-aliran politik dalam pers Tionghoa dan peranannya pada masa pergerakan nasional dalam bentuk tulisan.

4.3 Arti Penting Mempelajarinya

Peran Tionghoa pada masa pergerakan nasional merupakan kajian sejarah sosial. Etnis Tionghoa

sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia selama berabad-abad sehingga materi ini penting untuk dipelajari guna melengkapi gambaran dinamika dan proses perkembangan masyarakat secara luas, lengkap, dan kontinue. Materi ini mengandung nilai-nilai hidup yang dapat menanamkan kesadaran persatuan dan kesatuan serta solidaritas dengan menghargai keragamanan guna menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Materi ini dapat membuka wawasan peserta didik terhadap peran dan sumbangsih Tionghoa yang selama ini dianggap apolitis dan asosial.

Seiring dengan Reformasi, Tionghoa mulai diterima secara lebih positif oleh masyarakat. Saat ini cukup banyak orang Tionghoa yang duduk di pemerintahan dan terjun dalam berbagai profesi. Situasi ini harus didukung dengan pemahaman yang baik terhadap peran dan dinamika kehidupan masyarakat Tionghoa dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Ini penting dalam meningkatkan rasa toleransi, saling menghargai dan menghormati guna menghindari konflik rasial sekaligus menyokong upaya integrasi bangsa. Penanaman nilai-nilai ini bagi generasi muda dapat ditempuh melalui pembelajaran sejarah di sekolah. Dengan demikian dapat tercipta kehidupan masyarakat madani yang harmonis.

5. PENUTUP

Masyarakat Tionghoa memiliki peran dalam perjuangan pergerakan nasional awal abad 20. Kesadaran itu semakin tumbuh dengan berdirinya PTI yang bertekad memperjuangkan nasib rakyat bersama-sama dengan organisasi nasionalis lainnya dan memperjuangkan tercapainya Indonesia merdeka. Kajian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan materi pada mata pelajaran Sejarah Indonesia (wajib) kelas XI. Materi ini dapat diintegrasikan dalam KD 3.4. yang bergayut dengan KD 4.4. Mempelajari materi ini penting untuk menanamkan kesadaran persatuan dan kesatuan serta solidaritas dalam diri peserta didik guna menghargai keragamanan yang ada.

Penelitian ini membutuhkan penelitian lanjutan terkait dengan uji coba materi ajar berdasarkan rancangan pembelajaran yang direkomendasikan. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi ini. Tujuannya untuk mengetahui respon dari guru dan peserta didik sekaligus mengkritisi pengembangan materi dan perencanaan pembelajaran ini. Pada tahap selanjutnya dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah guna menyusun kurikulum mata pelajaran sejarah yang di dalamnya memuat peran dan kontribusi Tionghoa dalam perjalanan sejarah bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Mulyana dan Darmiasti. 2009. *Historiografi di Indonesia: Dari Magis-Religius Hingga Strukturis*. Bandung: PT Refika Aditama.

Aman. 2011. *Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang*. Yogyakarta: INSIST.

Benny G. Setiono. 2008. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: TransMedia.

Choirul Mahfud. 2013. *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gottschalk, Louis. *1985. Mengerti Sejarah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

La Ode, M.D. 2012. *Etnis Cina Indonesia dalam Politik: Politik Etnis Cina Pontianak dan Singkawang di Era Reformasi 1998-2008*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Leo Suryadinata. 1984. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: PT Grafiti Pers.

––––––––––. 1986. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

––––––––––. (Ed.). 2005. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Nasikun. 1984. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Onghokham. 2008. *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina: Sejarah Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Permendikbud Nomor 64. 2013. "Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah".

Permendikbud Nomor 69. 2013. "Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah".

Pringgodigdo, A.K. 1994. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sartono Kartodirdjo. 1995. Kebangsaan, Sejarah Nasional, dan Proses Integrasi. Dalam P.J.Suwarno (Ed.), *Seri Proklamasi: Negara dan Nasionalisme Indonesia* (hlm. 4-10). Jakarta: PT Grasindo.

Sidi Gazalba. 1966. *Sedjarah sebagai Ilmu*. Djakarta: Bhratara.

Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian Edisi Kedua*. Surakarta: UNS Press.

Taufik Abdullah. 2001. *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Yuanzhi, Kong. 2005. *Silang Budaya Tiongkok Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.